



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

**Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar**

Jl. Anjasmoro No. 53

Telp/Fax : 0342-804063

Email: bakesbangpol-pbd@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-NYA lah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara garis besar menyajikan informasi mengenai gambaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, serta implementasi dokumen perencanaan dan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan hasil kerjasama dan kerja keras dari berbagai pihak. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Blitar, Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Dan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar



IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar mengemban dua misi Pemerintah Kota Blitar, yang pertama misi ke-1: “Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai religius Dalam Kehidupan Bermasyarakat”, dengan tujuan “Meningkatkan kerukunan umat beragama”; yang kedua misi ke-5 “Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dengan Semangat Rukun Agawe Santoso” dengan tujuan “Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib dan Tentram”.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkanlah empat poin sasaran yang merupakan kinerja utama dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang harus dicapai sesuai target. Berikut empat sasaran dan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020:

1. Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama, dengan target 100% telah tercapai 100%.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram, ditetapkan target sebesar 100% dan telah memperoleh capaian kinerja sesuai target yaitu 100%.
3. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, capaian kinerjanya melebihi 100% yaitu sebesar 134,8%, hal ini dikarenakan realisasinya mencapai 80,9% melebihi target yang ditetapkan sebesar 60%.
4. Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik, capaian kinerja yang dicapai tidak bisa mencapai 100% tetapi hanya sebesar 95,6%, hal ini disebabkan realisasi yang dicapai dibawah target yang ditetapkan dari 78% hanya terealisasi 74,6%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja utama yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh

seluruh bidang. Pada Tahun 2020 anggaran yang teralokasi untuk Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar sebesar Rp. 9.479.091.616,00, terdiri atas anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.289.057.741,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 6.190.033.875,00. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 8.105.464.642,00 atau 85,51 % . Program yang dilaksanakan dalam mengelola dana tersebut terdiri dari 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Korban Bencana
5. Program Penanganan Konflik Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
6. Program Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7. Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar tahun 2020 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. DASAR HUKUM	8
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	10
F. ISU-ISU STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	19
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020	21
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 – 2020	40
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA	41
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL (TARGET SPM)	
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	42
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	45
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	46
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	48
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN	48
BAB IV PENUTUP	49
A. KESIMPULAN	49
B. LANGKAH PERBAIKAN	51

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 (terbaru)
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020m
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan salah satu unsur penyelenggaraan SAKIP.

Untuk selanjutnya petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur secara detail dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diamanatkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang diliputi semangat akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar secara periodik setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar. Di dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar secara terukur, sehingga LKjIP ini diproyeksikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya misi ke-1 dan ke-5 Pemerintah Kota Blitar yang diemban oleh

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar, yaitu: Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Religius Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dengan Semangat Rukun Agawe Santoso. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2014 tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana berdasar peraturan perundang-undangan ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana;
3. pengkoordinasian penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana;
4. penyelenggaraan tugas kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana ;
5. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana;
7. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan;
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan ;
9. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan;
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan penanggulangan bencana daerah mempunyai kewenangan:

1. penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
2. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia ;
3. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
4. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,

- bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
5. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia ;
 6. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota ;
 7. pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 8. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 9. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 10. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik

pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;

11. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
12. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
13. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
14. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
15. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
16. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum ;
17. pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum;
18. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di

bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum ;

19. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum ;
20. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum;
21. koordinasi penegakan Hak Azasi Manusia skala kota;
22. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota ;
23. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota ;
24. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota ;
25. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota ;
26. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota;

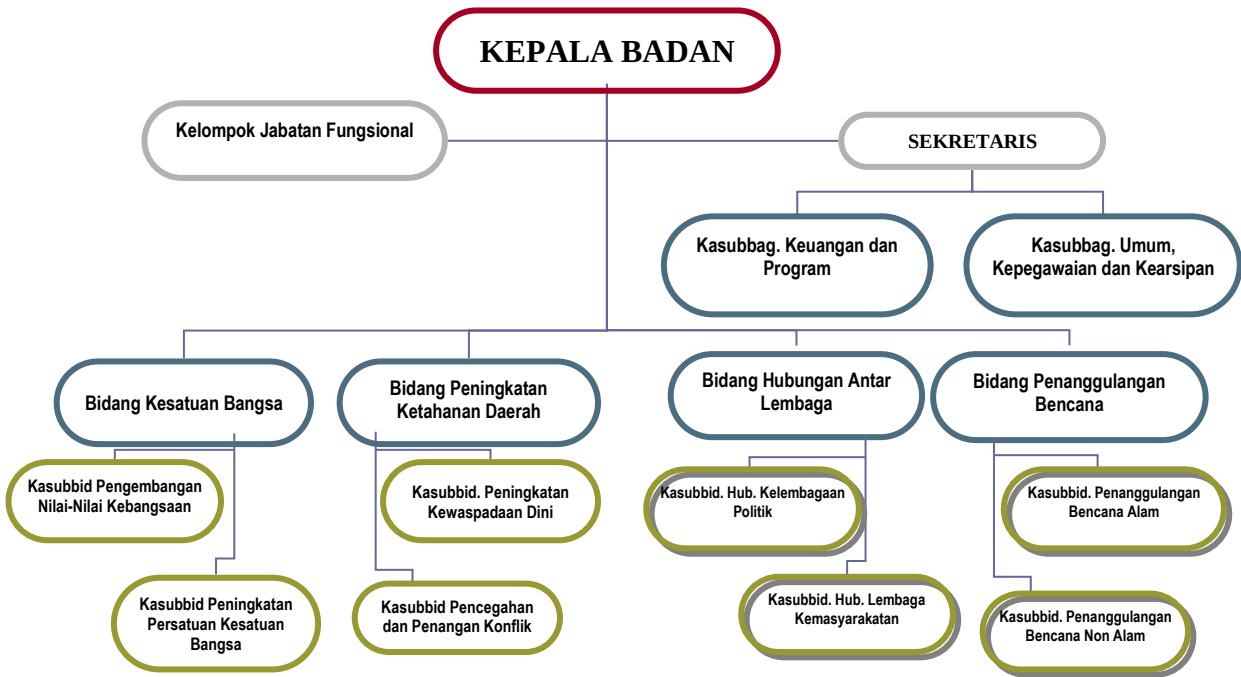
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa.
- d. Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
 2. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.

- e. Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik ;
 - 2. Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan.
- f. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Non Alam.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PBD KOTA BLITAR
 (Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2014)



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2020 dimaksudkan sebagai salah satu media pertanggungjawaban yang akuntabel mengenai pengukuran capaian kinerja organisasi. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Sarana penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (Supporting Unit) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah dengan baik dan benar (good governance) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mendorong tumbuhnya OPD yang akuntabel yang beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
5. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tujuan pelaporan kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2020, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021
8. Perda Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2020
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2020

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Terdapat beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Hal itu bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
SWOT Analisis

Analisis lingkungan internal		No.	Kekuatan (S)	No.	Kelemahan (W)
		1.	Perda Nomor 4 Tahun 2013 jo Perwali Kota Blitar Nomor 39 Tahun 2014	1.	Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal
		2.	Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesbang, Politik dan PBD Kota Blitar	2.	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
		3.	Adanya akses yang baik kepada infra struktur dan supra struktur Politik	3.	Peran Bakesbang, Pol dan PBD secara mendasar belum menyentuh Masyarakat, Sehingga Bakesbang, Pol dan PBD Kota Blitar kurang di kenal Masyarakat
		4.	Adanya koordinasi yang baik di jajaran Bakesbang, Pol dan PBD Kota Blitar dengan Badan / Dinas / Kantor / Bagian terkait.	4.	Job Discirption yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan / Dinas / Kantor maupun Bagian
		5.	Tersedianya Sumber Daya Manusia		
		6.	Adanya bentuk jejaring sebagai wadah / koordinasi lintas sektoral		
Analisis lingkungan eksternal		No.	Pendorong (SO)	No.	Status (WO)
1.	Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra	1.	Peningkatan peran dalam pemberdayaan infra dan supra struktur Politik, Wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM	1.	Peningkatan Sosialisasi eksistensi Bakesbang, Pol dan PBD Kota Blitar melalui terobosan – terobosan strategi dengan melibatkan

	struktur politik, wawasan kebangsaan, Demokrasi dan HAM	2.	Peningkatan kerja sama (fasilitasi) dengan Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi serta organisasi pengevakuan bencana.		partisipasi infra dan supra struktur Politik.
2.	Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan Demokrasi dan Penanggulangan Bencana			2.	Meningkatkan harmonisasi dan komunikasi sosial politik dengan elemen Masyarakat
				3.	Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Blitar
				4.	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM KotaBlitar
No.	Ancaman (T)	No.	Status Quo (ST)	No.	Penghambat (WT)
1.	Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1.	Melakukan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak	1.	Peningkatan kualitas SDM
		2.	Meningkatkan peran dan fungsi sebagai pelayan publik	2.	Meningkatkan kewaspadaan dini dengan menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan infra dan supra struktur Politik dan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam
2.	Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS	3.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam angka pendidikan dan pembangunan di Bidang IPOLEKSOSBUD		
3.	Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat (Vertikal, Horisontal dan SARA)	4.			
		5.	Melakukan koordinasi dengan infra dan supra struktur Politik untuk mengatasi potensi konflik		
4.	Relatif tingginya potensi Bencana Alam dan non Alam	6.	Melakukan koordinasi dengan infra dan supra struktur Politik untuk mengatasi potensi bencana alam dan non alam		

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Masih rentannya masyarakat terhadap isu-isu yang berpotensi konflik
2. Organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Kota Blitar belum berperan secara maksimal
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana

Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB 11

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 2016-2021 telah mempertimbangkan baik tentang kondisi dan potensi serta prospek perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan maupun yang menyangkut hambatan, kendala, dan resiko yang dihadapi sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi. Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2016-2021) adalah :

“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berada pada misi kesatu dan kelima, yaitu:

- 1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat**
- 2. Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso**

Mengacu dari dua misi inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani
2.	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman	Indeks Demokrasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase konflik sosial yang tertangani
			Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana
			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Ormas dan Orpol yang terdaftar

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

MISI I : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Mengoptimalkan penanganan apabila ada kejadian SARA	Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)
MISI V : Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukum Agawe Santoso			
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Mengoptimalkan penanganan Konflik social yang terjadi/muncul	Bekerja sama dengan instansi terkait
	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pendampingan lebih intensif kepada kelurahan tangguh yang sudah terbentuk	Melibatkan peran relawan, organisasi kebencanaan, PMI, Tagana, MMDMC, dan Pramuka
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Optimalisasi penggunaan aplikasi data base	Sosialisasi aplikasi data base

Sedangkan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	
Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Program Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
		1	Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia
		2	Peningkatan Pengembangan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Program Penanganan Konflik Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	
		1	Penguatan Kewaspadaan Daerah
		2	Pencegahan dan Penanganan Konflik
	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Korban Bencana	
		1	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana
		2	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Logistik, dan Fasilitas Rehab, Rekon Kebencanaan
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi	
		1	Peningkatan Kesadaran Politik dan Kapasitas Politik
		2	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
		3	Penyelenggaraan Pendukung Pemilu

Selain program dan kegiatan di atas, program dalam Urusan Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BLITAR

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100 %
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %
3	Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	60 %
4	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	78 %

PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Pengembangan nilai nilai kebangsaan persatuan dan kesatuan Bangsa	458.309.000,00
2.	Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	830.195.075,00
3.	Program pencegahan , kesiapsiagaan dan penanggulangan korban bencana	1.007.294.300,00
4.	Program pengembangan budaya politik dan penguatan demokrasi	2.998.819.000,00
	TOTAL	5.294.617.375,00

BAB 111

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak yang memberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel perlu dilakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik per triwulan dan per tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Pada capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian strategis untuk kemudian dapat disusun tindak lanjut yang harus dipenuhi untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja berbasis hasil evaluasi dapat dirumuskan solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{tingkat capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{tingkat capaian} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja berisi tujuan/ sasaran/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	60 %	80,9 %	134,8%
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	78 %	74,6 %	95,6 %

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

Sesuai Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, terdapat 4 (empat) analisis sasaran/ kinerja utama. Berikut adalah analisis capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi Tahun 2020:

I. Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama.

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang pertama ini adalah Persentase kejadian SARA yang tertangani, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan formulasi:

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah kejadian SARA yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian SARA}} \times 100 \%$$

Dengan tidak adanya kejadian SARA selama tahun 2020 maka realisasi yang dicapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya 100 % dengan kategori **sangat berhasil**

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase kejadian SARA yang tertangani sesuai dengan target, yaitu: Program Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan kegiatan Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia dan Peningkatan Pengembangan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan.

Secara garis besar, pelaksanaan program dan kegiatan ini telah berkontribusi terhadap penanganan kejadian SARA. Namun demikian, upaya peningkatan penanganan kejadian SARA terus dioptimalkan dengan terus melakukan Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB).

II. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Untuk Menciptakan Kondisi Yang Aman dan Tentram

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang kedua ini adalah persentase konflik sosial yang tertangani, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned} \text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik sosial}} \times 100 \% \\ &= \frac{21}{21} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan, realisasi kinerja utama sebesar 100 %, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 100 %. Realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga didapat capaian kinerja utama yang kedua sebesar 100 %, dengan kategori **sangat berhasil**.

Data jumlah konflik sosial yang tertangani diperoleh bidang Peningkatan Ketahanan Daerah yang telah menangani kejadian konflik sosial. Adapun 21 konflik yang terjadi dan sudah ditangani:

No	Hari/tanggal	Uraian Kejadian	Keterangan
1	Januari '20	Permasalahan PSTL di Kel.Tanjungsari	Dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat
2		Protes masyarakat lingkungan Ngegong Kel.Gedog Kec.Sananwetan terhadap keberadaan TPA yang menyebabkan bau dan lalat	Dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat
3		Rencana pembangunan kantor Kel. Gedog agar diletakkan di lingk. Ngegong	Potensi konflik
4		Konflik rencana penempatan pedagang pasar legi	Potensi konflik
5	Pebruari '20	Kerusuhan yang disebabkan bentrok supporter Arema VS Bonek pada pertandingan sepak bola Piala Gubernur 2020	Dapat diselesaikan dengan melibatkan Pemprov Jatim
6	Juni '20	Penolakan ijin penggunaan ruko sebagai tempat ibadah	Dapat diselesaikan dengan penundaan ijin dimaksud
7		Pembongkaran TPS utara Stadion Supriadi Kel.Kepanjenlor	Potensi konflik yang dapat diselesaikan dengan mufakat
8		Penolakan warga lingk.Sangut Kel.Bendo ataspenempatan container ampah di area wisata Sumber udel	Dapat diselesaikan dengan tetap dibangun tetapi opsionalnya ditunda
9		Unjuk rasa PMII di depan Mapolresta Blitar terkait kekerasan yang dilakukan anggota Polres Pamekasan terhadap anggota PMII di Pamekasan	Dapat diselesaikan bersama jajaran TNI/Polri dan pengamanan yang lain
10		Unjuk rasa simpatisan dan pengurus PDIP Kota Blitar terhadap pembakaran bendera PDIP	Dapat diselesaikan bersama jajaran TNI/Polri dan pengamanan yang lain
11		Penolakan pemakaman kasus covid-19 di kel.Tanjungsari	Dapat diselesaikan
12		Penolakan warga Malaysia terpapar covid-19 di kel.Tanjungsari	Dapat diselesaikan
13		Penolakan pemakaman kasus covid-19 di kel.Karangarikarena	Dapat diselesaikan

		yang bersangkutan ber-KTP Madiun	
14	Juli'20	Unjukrasa PMII di depan Kantor Perhutani Kab.Blitar	Dapat diselesaikan bersama jajaran TNI/Polri dan pengamanan yang lain
15		Unjuk rasa BEM se-Blitar raya di depan Kantor DPRD Kota Blitar terkait dengan RUU Omnibus law	Dapat diselesaikan bersama jajaran TNI/Polri dan pengamanan yang lain
16		Unjuk rasa warga lingk. Ngegong Kel. Gedog menolak penutupan lintasan sebidang di link. Ngegong Kel. Gedog	Dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat
17	6 September'20	Unjukrasa bapason Lis-Teteng yang tidak puas dengan kegagalan mereka dalam pencalonan dari calon perseorangan	Dapat diselesaikan bersama jajaran TNI/Polri dan pengamanan yang lain
18	12 September'20	Unjukrasa bapason Lis-Teteng yang tidak puas dengan kegagalan mereka dalam pencalonan dari calon perseorangan	Dapat diselesaikan bersama jajaran TNI/Polri dan pengamanan yang lain
19	6 Okt'20	Pemasangan poster di depan Kantor DPRD Kota Blitar yang menolak RUU Omnibus law oleh perempuan yang mengatas namakan Perempuan peduli petani dan buruh	Dapat diselesaikan
20	20 Nop '20	Unjuk rasa di depan kantor Dinas Penanaman Modal Naker dan PTSP oleh LSM GPI dan perwakilan masyarakat terkait ijin berdirinya BTS seluler di kel. Kepanjenkidul	Diterima oleh Kadin PM, Naker & PTSP Kota Blitar beserta tim tetapi tidak ada kata sepakat
21	23 Nop '20	Unjuk rasa lanjutan di depan kantor Walikota Blitar oleh LSM GPI dan perwakilan masyarakat terkait ijin berdirinya BTS seluler di kel. Kepanjenkidul	Diterima oleh Sekda Kota Blitar dan akhirnya unjuk rasa bias menerima kesepakatan

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama ini secara garis besar sudah dilaksanakan secara optimal guna tercapainya penanganan konflik sosial. Namun demikian tetap perlu bekerjasama dengan instansi terkait.

III. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana

Kelurahan Tangguh Bencana adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Adapun syarat-syarat menjadi kelurahan tangguh bencana adalah memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang ketiga ini adalah persentase kelurahan tangguh bencana, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

Formulasi = $\frac{\text{Jumlah kelurahan tangguh bencana}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100 \%$
 $= \frac{17}{21} \times 100 \%$
 $= 80,9 \%$

Dari hasil perhitungan, diperoleh realisasi kinerja utama 80,9 %, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 60%. Nilai realisasi ini menunjukkan capaian kinerja utama sebesar 134,8% dengan kategori **sangat berhasil**.

Data 17 kelurahan yang telah terbentuk sebagai kelurahan tangguh bencana adalah sebagai berikut:

1. Kauman	7. Karangsari	13. Karangtengah
2. Kepanjenlor	8. Sukorejo	14. Plosokerep
3. Tanggung	9. Pakunden	15. Blitar
4. Bendo	10. Tanjungsari	16. Tlumpu
5. Sananwetan	17. Ngadirejo	17. Sentul

6. Gedog	12. Kapanjenkidul	
----------	-------------------	--

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama ini secara garis besar sudah dilaksanakan secara optimal guna terbentuknya kelurahan tangguh bencana. Untuk 4 kelurahan yang belum yaitu Kelurahan Turi, Bendogerit, Klampok dan Rembang akan dibentuk pada tahun 2021.

IV. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang keempat ini adalah persentase ormas dan orpol yang terdaftar, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned}
 \text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah Ormas dan Orpol yang terdaftar}}{\text{Jumlah Ormas dan Orpol}} \times 100\% \\
 &= \frac{150}{201} \times 100\% \\
 &= 74,6 \, \%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan, diperoleh realisasi kinerja utama sebesar 74,6 %, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 78 %. Lebih rendahnya realisasi dibanding target yang telah ditetapkan menyebabkan capaian kinerja utama hanya sebesar 95,6 % dengan kategori **sangat berhasil**.

Tidak tercapainya kinerja 100 % hal ini disebabkan untuk ormas/LSM yang sudah terdaftar yang aktif dan tidak aktif belum terdeteksi secara maksimal, masih adanya Ormas/LSM yang tidak merespon ketika dihubungi, pindah alamat domisili sekretariat Ormas/LSM namun tidak memberitahukan kepada Bakesbangpol & PB, re-Organisasi Pengurus Ormas/LSM namun juga tidak ada pemberitahuan. Sehingga hilang kontak. Langkah kebijakan yang diambil adalah dengan sosialisasi aplikasi Database Ormas/LSM dengan harapan ormas/LSM mengisi aplikasi tersebut sebagai tanda terdaftar dan aktif.

Sedangkan untuk Ormas yang belum terdaftar dikarenakan beberapa ormas yang beraktifitas di Kota Blitar namun belum

terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan Legalitas ormas/LSM, dan ada ormas/LSM yang sekretariatnya di luar wilayah Kota Blitar, kurangnya kesadaran pengurus Ormas/LSM untuk mentaati peraturan yang berlaku. Langkah kebijakan yang diambil adalah dengan membentuk Tim Pengawasan Ormas dan memberikan pembinaan kepada Ormas/LSM yang belum sesuai peraturan perundangan.

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama ini secara garis besar sudah dilaksanakan secara optimal, dari data jumlah ormas orpol yang ada dikota Blitar sebanyak 201 yang sudah terdaftar masih 150 dan sisanya dengan tanda warna biru pada table adalah yang belum terdaftar. Berikut adalah daftar ormas dan orpol:

DAFTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA BLITAR

NO	ORMAS/ LSM/ YAYASAN	NAMA ORGANISASI	SURAT KETERANGAN TERDAFTAR	SUSUNAN PENGURUS			ALAMAT	
				KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ALAMAT 1	KECAMATAN
1	ORMAS	Wanita Khatolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Blitar	00-35-72/0001/II/2015	Maria Theresia I.A.	MI Widjayanti Retno W	MI Renny Irawani	Jl. Diponegoro No. 42 Blitar	SANANWETAN
2	ORMAS	Persatuan Wanita RI (PERWARI)	00-35-72/0002/II/2015	Sri Hidayati	Lilik Setyawati	Hj. Kundari I.S	Jl. Slamet Riyadi No. 10 Blitar TELP. 0342.802529	KEPANJENKIDUL
3	LSM	The Post Institute	00-35-72/0003/II/2015	Mawan Mahyudin	Muslikah	Ben Desi Arisandi	Jl. Muradi 01 TELP. 0342.814484	SANANWETAN
4	ORMAS	PC. Majelis Agama Budha Theravada Indonesia (MAGABUDHI)	00-35-72/0004/II/2015	Sugianto Gandhika	Drs. Budiono	Wandoyo	Jl. Slamet Riyadi No. 21 Blitar TELP. 0342.802616	KEPANJENKIDUL
5	ORMAS	PC. Nadhlatul ulama (NU)	00-35-72/0005/II/2015	H.DAIMAN AZIS, BA	Drs. ZAENURI	HA.SOEPANG AT, BA	Jl. Cisadane Blitar	KEPANJENKIDUL
6	YAYASAN	Yayasan Iman Blitar	00-35-72/0006/II/2015	Drs. RA. SUDARWADJI	SUPRAPTI, BRE.	Drs. WIRORENO	Jl. Sudarmo No. 1 Blitar TELP. 0342.801775	SANANWETAN
7	ORMAS	Muslimat NU Cabang Blitar	00-35-72/0007/II/2015	Hj. Umi Salamah	Tatik Kusumawati	Hj. Zaenab	Jl. Masjid No. 24 Blitar TELP. 0342.801120	KEPANJENKIDUL
8	ORMAS	PEPABRI Cabang Kota Blitar	00-35-72/0008/II/2015	H. Bari Subariyanto	Subagio		Jl. Kombes Pol Duryat No 8 BlitarTELP. 0342.801642	SANANWETAN
9	ORMAS	Piveri Kab / Kota Blitar	00-35-72/0009/II/2015	SYAMSIAH SURATMAN	SUKARTATIK	MARIJAM SOEPARNO	Jl. Tanjung no. 1 Blitar Telp. 805002 /	SUKOREJO

							807489 / 802283	
10	ORMAS	DPC LVRI Blitar	00-35- 72/0010/II/201 5	SOERAT MAN	SOENTORO	A.H NOERBUANA	Jl. Tanjung 1 Blitar TELP. 0342.805002	SUKOREJO
11	ORMAS	Persatuan Purnawirawan Polri (PP POLRI)	00-35- 72/0011/II/201 5	KAMALI	SOEGIJANT O	NY.SUPRIHATI N S.	Jl. Legundi No. 418 Blitar TELP. 0342.808864	SANANWETAN
12	ORMAS	PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAW AN PERIP Blitar	00-35- 72/0012/II/201 5	Heriyanti Sutarji	Bibit Tumirah S.	Sringatin Matsalam	Jl. Kombes Duryat No. 8 Blitar TELP. 0342.801642	SANANWETAN
13	ORMAS	Dewan Harian Cabang Angkatan (DHC) 45 Blitar	00-35- 72/0013/II/201 5	H. SOERAT MAN	ARIS SUYATNO, BA	H.SOEKIMAN	Jl. Tanjung No. 1 Blitar TELP. 0342.805002	SUKOREJO
14	YAYASAN	Panti Asuhan Muhammadiyah h Kota Blitar	00-35- 72/0014/II/201 5	H. MOCH MUNIR	LISANA NURWIDYA SARI	H. MOCH SUHADI	Jl. Ir. Soekarno 44 Blitar TELP. 0342.802516/8 11263	KEPANJENKIDUL
15	YAYASAN	Yayasan PGRI	00-35- 72/0015/II/201 5	Heri Sukamto, Spd	ACHMAD SHLEH		Jl. Kalimantan 49 Blitar TELP. 0342.808765	SANANWETAN
16	ORMAS	Peguruan Ilmu Seni Beladiri Pencak Silat Tenaga Dalam “Basmalah”	00-35- 72/0016/II/201 5	HM. SUNARY O	M. IRWANSYA H	ARIS SOBIK DIYANTO	Jl. Aryo Blitar Rt.3/II Blitar TELP. 0342.804230	SUKOREJO
17	YAYASAN	Yayasan Lembaga Mitra Usaha Masyarakat (LIMMAS)	00-35- 72/0017/II/201 5	MOCH. MUHDI	SUBIANTOR O, BSc.	HENDRA C AHYA	Jl. Suren 35 Blitar TELP. 0342.7766876	SANANWETAN
18	ORMAS	FERMATA	00-35- 72/0018/II/201 5				Jl. Ir. Soekarno No. 93 Kota Blitar TELP. 0822 3409 9927	KEPANJENKIDUL
19	ORMAS	FKPPI	00-35- 72/0019/II/201 5	Bayu Setyo Kuncoro			Jl. Tanjung No. 3 Blitar	SUKOREJO
20	ORMAS	Purna Paskibraka Indonesia Kota Blitar	00-35- 72/0020/II/201 5	Haryo Aditya	Djarmika	Einggrit	Jl. Ciliwung No. 28 Blitar TELP. 0342.7806953	KEPANJENKIDUL
21	ORMAS	Asosiasi Petugas Rekrut Tenaga Kerja Indonesia Kota Blitar (ASPERTI)	00-35- 72/0021/II/201 5				Jl. Seruni No. 15 Kota Blitar	KEPANJENKIDUL
22	YAYASAN	Yayasan Rukun Ginawa Sentosa (YARGIS)	00-35- 72/0022/II/201 5	Syaiful Bahri	Yakup Sutrisno	Hartoyo	Jl. Kalasan No. 108 RT 5/7 Blitar TELP. 087759312595	SANANWETAN
23	YAYASAN	Yayasan Permata Bintang	00-35- 72/0023/II/201 5	ANAS RITA UDIN	DEWI NATALIA	JUMI MARISAN DEWI	Jl. Borobudur no. 4 Blitar TELP. 085746646963	SANANWETAN
24	LSM	Indonesia Tumpas Korupsi (INTI)	00-35- 72/0024/II/201 5	Ludiono Oktariaw an	Dwiky Pradipta	Maria Nunung Indriati	Jl. Cut Nyak Dien 11 Sentul	KEPANJENKIDUL
25	YAYASAN	Yayasan Paraphisikologi Semesta	00-35- 72/0025/II/201 5	TEDDY KLENIK	BAMBANG		Perumnas Pakunden F.12 Blitar TELP. 085707997757	SUKOREJO
26	YAYASAN	Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa	00-35- 72/0026/II/201 5	KI Drs. AGUS SUSILO	Dra. T.P. ANDAYANI		Jl. A.Yani 46 Blitar TELP. 0342. 802254	SANANWETAN
27	ORMAS	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	00-35- 72/0027/III/201 5	AKHMAD KHOIRUD IN	MUH ROMDONI	IQBAL FATAWI	Jl. Nias : 93 Sananwetan Blitar TELP. 085755588801	SANANWETAN

		(PMII) Cabang Kota Blitar						
28	ORMAS	DPC PROJO (PRO JOKOWI)	00-35-72/0028/III/2015	FERRY YUSWANTO	IWAN NAWANJAYA	Hj. ESTI PRATIWI	Jl. TGP NO 1 BLITAR	KEPANJENKIDUL
29	LSM	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	00-35-72/0029/III/2015	PARDI			Jl. Imam Bonjol No. 14 Blitar	SANANWETAN
30	LSM	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ky. R. M Kasiman	00-35-72/0030/III/2015	Nurwandito A	Arinatus S	Rahayu Sri Utami	Jl. Masjid Nomor : 15 – Blitar TELP. 0342-801713	KEPANJENKIDUL
31	YAYASAN	Yayasan KY. R. Moh. Kasiman Blitar	00-35-72/0031/III/2015	Drh. MAS TRANGGONO	Drs. H. NAWADJI ROMLI	RAHAYU SRI UTAMI	Jl. Masjid No. 15 Blitar	KEPANJENKIDUL
32	ORMAS	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)	00-35-72/0032/III/2015	SUNARYO	TAPE ASTAWA		Perum GKR Blok D 3 Blitar TELP. 0342.810598	SANANWETAN
33	YAYASAN	Yayasan Harmoni	00-35-72/0033/III/2015	Pdt Max Prayogianto	Ev Nolha Malke Rumondor	Tabita Megah Irawati	Jl. Cemara Selatan No. 66 Blitar	SUKOREJO
34	ORMAS	Ikatan Dai Indonesia (IKADI)	00-35-72/0034/III/2015	Dr. AZHAR ANWAR	TAUFIQ R.HAKIM	MOCH. SUMITRO	Jl. Enggano Kel.Sananwetan	SANANWETAN
35	YAYASAN	Yayasan Monumen Syuhada' Haji	00-35-72/0035/III/2015	H. Zaenal Effendi	Siti Mu'awanah	Annatul Munichah	Jl. Lekso No. 5 Blitar	SUKOREJO
36	ORMAS	Ikatan Pengemudi Transportasi Umum Indonesia (IPTUINDO)	00-35-72/0036/III/2015	SUPRIYONO	SUROS	ROYTRIAN	Jl. Melati 73 Blitar	KEPANJENKIDUL
37	ORMAS	PD Senkom Mitra Polri Lokal Jatim 07 Blitar	00-35-72/0037/III/2015	H. HERI CAHYONO	MUHAJRIN	H. SUPRIYANTO	Jl. IR SOEKARNO 200	SANANWETAN
38	LSM	FORMAK	00-35-72/0038/IV/2015	TRI SASONGKO	SUSILO	BASOIR DANUKERTO	Jl. Kerantil Gang V No. 6 Blitar	SUKOREJO
39	ORMAS	FATAYAT NU KOTA BLITAR	00-35-72/0039/IV/2015	SRIATIN	SITI MAHMUDAH	SUMIARI	Jl. MASJID 24	KEPANJENKIDUL
40	ORMAS	Ikatan Bidan Indonesia	00-35-72/0040/VI/2015	DWI SAKTI NURHAYATI	SRI ASBUDIARTI	SRI HANDAYANI	Jl. SUDANCO SUPRIADI NO 61 BLITAR TELP. (0342) 802162	SANANWETAN
41	ORMAS	KOTA BLITAR DEVELOPMENT COMMITTEE (BLITAR-DEC)	00-35-72/0041/VII/2015	NURUL HIDAYAH	NUR ROZIK	NURHUDA	Jl. Ternate RT002 RW 004 Kel. Klampok	SANANWETAN
42	ORMAS	KOMUNITAS SEPEDA TUA INDONESIA (KOSTI)	00-35-72/0042/X/2015	0	0	0	Jl. TURI SELATAN NO. 3 KOTA BLITAR	SUKOREJO
43	YAYASAN	YAYASAN OMAH SURGA	00-35-72/0043/X/2015	0	0	0	Jl. KELUD NO. 28 KOTA BLITAR	KEPANJENKIDUL
44	ORMAS	DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Blitar	00-35-72/0044/X/2015	a. Ket : Imam Buchori	b. Sek :	c. Ben :	Jl. Riau No. 42 Kota Blitar	SANANWETAN
45	LSM	LSM Jaring Investigasi Kejahatan Aparat (LSM Jihat)	00-35-72/0045/X/2015	a. Ket. Ir. Joko Trisno Mudiyanto	b. Sek.Tri Sumardianto	c. Ben.Muhammad Agus Rosidi	Jl. Toba F-26 Blitar Perum Pakunden Permai 081 334 499 867	SUKOREJO
46	ORMAS	IKATAN PELAJAR	00-35-72/0046/I/2016	ISOMUDI N ZUHRI	ACHMAD BAIHAQI	WATER TRI LAKSONO	Jl. CISADANE Kel.Bendo	KEPANJENKIDUL

		NAHDLATUL ULAMA (IPNU)					Blitar 085746540188	
47	ORMAS	NASYIATUL 'AISYIYAH	00-35- 72/0047/I/2016	SEFTI ANA W.	YUNI MASRURI	NUNIK PURNAWIART I	JL. COKROAMINO TO NO.3	KEPANJENKIDUL
48	LSM	GERBANG TOBAT	00-35- 72/0048/I/2016	H. EDI PURWOK O	ANWAR NURIS	YESY PURWITOSARI	JL. CANDI SURAWANA NO.29	KEPANJENKIDUL
49	ORMAS	PERKUMPULAN FAMILY BIRD CAMONDAN KOTA BLITAR	00-35- 72/0049/V/201 6	MOH. HADI POERNO MO	MOH. ROBY LUTHFIANT A	ABDUL MUNTHOLIB	JL. LAWU NO.29 B KOTA BLITAR	KEPANJENKIDUL
50	ORMAS	HIMPUNAN INSAN PECINTA BUNG KARNO (HIP-BK)	00-35- 72/0050/VI/201 6	TAN NGI HING	SUNARI	IDA ARIYATI	JL. BENGAWAN SOLO NO.7 KOTA BLITAR	KEPANJENKIDUL
51	LSM	LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI)	00-35- 72/0051/VII/20 16	SOFIA DEWI	THORIQ BOMA	DODY ARIEF	JL. CEMARA SELATAN 68 KOTA BLITAR	SANANWETAN
52	LSM	PURBOKAYUN II	00-35- 72/0052/VIII/20 16	ANWAR NURIS	DEDDY YANU	ANDIKA YUSUF	JL. KALASAN 61 KOTA BLITAR	SANANWETAN
53	ORMAS	Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Cab. Blitar	00-35- 72/0053/VIII/20 16	Dr. Azhar AnwaR	H. ArdhiSyams yarifin	Agus Susanto	Jln Cemara No.249 Blitar	SUKOREJO
54	LSM	LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL KOTAK AMAL INDONESIA	00-35- 72/0054/IX/201 6	WARSITO	SISWATUN	SISWATUN	JL. CIPEMALI GG. X NO.18 KOTA BLITAR 085730691155	SANANWETAN
55	YAYASAN	YAYASAN AL MUALLIMIN AL BLITARI CABANG KOTA BLITAR	00-35- 72/0055/IX/201 6	MASHUD A	RINA AGUSTINA	ARI HIDAYATI	JL. KALI LEKSO RT.02 RW.01 PAKUNDEN 081554238847	SUKOREJO
56	ORMAS	PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIY AH KOTA BLITAR	00-35- 72/0056/IX/201 6				JL. Ir. SOEKARNO NO. 13 KOTA BLITAR	KEPANJENKIDUL
57	ORMAS	RAPI Blitar	00-35- 72/0023/X/201 4	a. Ket. : Drs. Tri Iman P, M.Si	b. Sek.: Eko Nuv Riyanto	c. Ben : Agus Subagyo	Jl. Kelud kopl. Stadion Supriyadi Blitar	KEPANJENKIDUL
58	YAYASAN	Yayasan Gerontologi Abiyoso Blitar	00-35- 72/0058/I/2017 , SB	Drs. H. Soeryono	Masdoeki	Drs. H. Is Soegianto	Jl. Musi No.5 Blitar	KEPANJENKIDUL
59	ORMAS	Persatuan Wredatama RI (PWRI)	00-35- 72/0004/VI/201 3	Drh. MASTRA NGGONO	SOEWANDH IE	SUKARNI SUPADI	Jl. Anjasmoro No. 83 Blitar	KEPANJENKIDUL
60	ORMAS	Senam Tera Indonesia (STI) Cabang Kota Blitar	00-35- 72/0012/X/201 3	a. Ket : JH Karsum	b. Sri Andfarwati	c. Hj.NY Nugroho	Jl. Cipemali : 60 Tanggung – Blitar	KEPANJENKIDUL
61	ORMAS	Perkumpulan Fajar Jaya Dharma Sosial Blitar	00-35- 72/0002/III/201 3	a. Ket : Sintawati	c. Sek : Bambang Setiawan	d. Ben : Megah Irawati	Jl. Ir. Soekarno 345 Sentul Blitar	KEPANJENKIDUL
62	LSM	Gerakan Pemuda Nusantara (GPN)	00-35- 72/0002/IV/201 3	a. Ket : Fajrul Fathin	b. Sek :Prayitno	c. Ben : Nurmuidatul Rhmah	Jl. Maninjau D 5 Nomor : 8 RT 01/06 Tanjungsari Blitar	SUKOREJO
63	LSM	Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa (LSPPB)	00-35- 72/0005/VI/201 3	a. Ket : Ummu Chairu W, SE	b. Sek : Fitrotun Nisa, A.Md	c. Ben : Heyang Sekti Firmalena	Jl. Ir Soekarno Nomor : 32	KEPANJENKIDUL
64	ORMAS	Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)	00-35- 72/0008/VII/20 13	a. Ket : Ernawati, S.Pd	b. Sek : Masdarul Khoiri, S.Pd	c. Ben : Marliana Supratiwi R, S.Pd	Jl. Perum Puri Kenari Asri Blok J-2	SANANWETAN

							Karangtengah Kota Blitar	
65	YAYASAN	Yayasan Al Ghifari	00-35-72/0018/I/2014	a. Ket : Nurhadi	b. Sek : Taufiq R Hakim	c. Ben : Sofie Dewi	Jl. Sumba Nomor : 38 – Blitar	SANANWETAN
66	ORMAS	Gabungan Olahraga Wanita (GOW)	00-35-72/0020/X/2014	a. Ket : Hj. Purnawa n Buchori	b. Sek : Yani Heryanti A	c. Ben :Ny. Hadi Maskun	Jl S. Supriyadi Nomor : 18 – Blitar	SANANWETAN
67	ORMAS	Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM)	00-35-72/0021/VII/2014	a. Ket : Mustofa, S.Pd	b. Sek : Sri Haryawati, S.Pd	c. Ben : Sunaryo, SE	Jl. Ciliwung Nomor : 304 – Blitar	KEPANJENKIDUL
68	ORMAS	Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia (PERWOSI)	00-35-72/0022/VI/2014	a. Ket : Yuli Samanhu di	b. Sek : Ny. Hadi Maskun	c. Ben : Sri Suwartiingru m	Jl. S. Supriyadi Nomor : 22 Blitar	SANANWETAN
69	ORMAS	Himpunan Paudi kota Blitar	00-35-72/0024/VI/2014	a. Ket : Sri Winarsih, S.Pd	b. Sek : Dona Kusuma, S.Sos	c. Ben : TC Prasetyarini	Jl. S. Supriyadi Nomor : 18 Blitar	SANANWETAN
70	ORMAS	Gab. Organisasi Penyelenggara TK Indonesia (GOPTKI) Kota Blitar	00-35-72/0026/VI/2014	a. Ket : Erny Hasnil Purwant o	b. Sek : Wiwin Suharsono	c. Ben : Lasiyem Sulas Asih	Jl. S. Supriyadi Nomor : 22 Blitar	
71	LSM	Lembaga Pengawas Independen Indonesia (LPII) Cabang Kota Blitar	00-35-72/0007/VII/2013	a. Ket : Suwadi	b. Sek : Nining Setyowati	c. Ben : Daerobi	Jl. Kelengkeng 51 Karangsari – Blitar	SUKOREJO
72	ORMAS	Generasi Muda “ KOSGORO ” Cabang Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	Drs.Mory ani,SH	Dra.T.P.And ayani	A.HMoerdani, MSc	Jl. Untung Suropati No. 1 Blitar	KEPANJENKIDUL
73	ORMAS	Dewan Kesenian Kota Blitar (DKKB)	belum pembaharuan SKT	Susanto, WS	Djoko Harijanto	Wiwik Triasih	Jl.Ir. Soekarno Blitar	KEPANJENKIDUL
74	ORMAS	Ikatan Remaja Muhamadiyah (IRM)	belum pembaharuan SKT	Mustaki m	W.Bajuri Nurul	Aini	Jl. Cokroaminoto No. 03-05 Blitar	KEPANJENKIDUL
75	ORMAS	Majelis Pelestari Ajaran Bung Karno (MPA-BK)	belum pembaharuan SKT	H.Tabi Hutomo	Drs.Sujarwo	Bambang Gunawan	Jl. Dewa Ruci D-14 BTN Wisma Indah Blitar .	KEPANJENKIDUL
76	ORMAS	Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO)	belum pembaharuan SKT	Ir.Budi Santoso	Dukut Milyono	Wiwoho	Jl. Gatut Koco Blok. G No. 9- 10 Blitar	KEPANJENKIDUL
77	LSM	Gerakan Pemuda Ansor (GP-ANSHOR) Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	Didin Mashudi, BA	Rully Mardiyanto	M.Muchtar	Jl. Masjid No. 22 Blitar	KEPANJENKIDUL
78	ORMAS	Perserikatan Aisyiyah Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	H.Heny Zahrohan i	H.Chomsatu n		Jl. Cokroaminoto No. 3 Blitar	KEPANJENKIDUL
79	ORMAS	DPD “ HIDAYATULLAH ” Cabang Blitar	belum pembaharuan SKT	Zaenudin Khoiri	Muhammad Muslim	Muhammad Riyadi,S.Pd.I	Jl. Veteran No. 34 Blitar	SANANWETAN
80	LSM	Paguyuban Korban Orde Baru (PAKORBA)	belum pembaharuan SKT	Warodi			Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 21 Blitar.	SANANWETAN
81	ORMAS	Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)	belum pembaharuan SKT	I Made Biasa SM.IKA	M.Hanafi	M.Agus Slamet,SE	Jl. Cokroaminoto Gang Masjid Blitar	KEPANJENKIDUL

82	ORMAS	Bhayangkari Cabang Blitar	belum pembaharuan SKT	Ny.Gatot Subianto ro			Jl. Sudirman No. 32 Blitar	KEPANJENKIDUL
83	ORMAS	Perserikatan Muhammadiyah Cabang Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	H. M. CHAFIF	Drs. H. MASRUCHIN		Jl. AKS TUBUN No. 3 Blitar	SANANWETAN
84	ORMAS	Perserikatan Muhammadiyah Kec. Kep.kidul Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	ABDUL HAMID	ACHMAD MAMIK CH.		Jl. Kelud No. 70. B Blitar	KEPANJENKIDUL
85	ORMAS	Dharma Pertiwi Cabang Blitar	belum pembaharuan SKT	ARIES SUHARDONO	Ny. SUGYONO		Jl. A. Yani No. 6 Blitar	SANANWETAN
86	ORMAS	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	Ny.HJ. SUYANTO.SE.MM	HJ.SRI SUHARTIS		Jl. Sudanco Supriyadi No. 18 Blitar	SANANWETAN
87	ORMAS	Persekutuan Do'a Ekklesia Blitar	belum pembaharuan SKT	Bambang Indra Misianto	HenokHerman Widodo		Perumnas Pakunden Blitar	SUKOREJO
88	ORMAS	Paguyuban Kaweruh Mursitomo Waskito Tunggal	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : TRIM RIONO	b. Sek. : SISWANTO	c. Ben. :	Jl. Widuri No. 325 Blitar	SUKOREJO
89	ORMAS	Perkumpulan Keluarga Besar " Tunggal Wulung "	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : NINUS SUDARWATI	b. Sek. : RITA LEO MEDY.P	c. Ben. :	Jl. Musi No. 05 Blitar	KEPANJENKIDUL
90	ORMAS	Persatuan Warga Theosofi Indonesia (PERWATHIN)	belum pembaharuan SKT	a. Ket. :UNTUNG RAHARDJO	b. Sek. : NY. HARDJITOE	c. Bend.:	Jl. RA. Kartini 28 Blitar	KEPANJENKIDUL
91	ORMAS	Perguruan Senam Tenaga Dalam Bhirawa Seta	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : R. HENDROMS.	b. Sek. : DIDIT SUGIANTO	c. Bend.:	Jl. Slamet Riyadi 80 Blitar	KEPANJENKIDUL
92	ORMAS	Persatuan Dokter Gigi Indonesia	belum pembaharuan SKT	a. Ket.: Drg. HM. SUDARMADJI	b. Sek.: Drg.DWI RAHAYU	c. Bend.:	Jl. Jagung Suprpto 15 Blitar	KEPANJENKIDUL
93	ORMAS	DPC. Gapensi	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : JODIONO	b. Sek. :	c. Ben.:	Jl. Ngegong Gedog Blitar	SANANWETAN
94	ORMAS	Forum Komunikasi Interaksi Sosial	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : Drs. HARNO WO EKO	b. Sek. : AGUS HADI	c. Ben.:	Jl. Nias No. 75 Blitar	SANANWETAN
95	ORMAS	Becak Wisata Makam Bung Karno	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : MARYONO	b. Sek. :SULIS	c. Ben. :	Jl. Dr. Cipto No. 3 (PIPP) Blitar	KEPANJENKIDUL
96	ORMAS	Himpunan Pedagang di Makam Bung Karno (HIPEMAB)	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : SUTARTO HADI	b. Sek. :YUDI	c. Ben. :	Jl. Dr. Cipto No. 3 Blitar (PIPP)	KEPANJENKIDUL
97	LSM	Persatuan Reformasi Indonesia Insan Bersaudara	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : BU TRUKISH	b. Sek. :	c. Ben. :	Gaprang Maunen No. 4 Rt.4/I	SANANWETAN
98	ORMAS	Forum Komunikasi Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket. :Drs. HARNOMO EKO	b. Sek :	c. Ben. :	Jl. Nias No. 75 Blitar	SANANWETAN
99	LSM	LPPM dan UKM	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : M. HANAFI	b. Sek. : Ir. HERRY.S	c. Ben. :	Jl. Kalimantan 34 Blitar	SANANWETAN
100	LSM	Badan Musyawarah (BAMUS) Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : SUKARDI, SPI.	b. Sek. : M.MUZAMI L. S.Ag.	c. Ben. :	Jl. Dieng Gg. II No. 35	KEPANJENKIDUL

101	YAYASAN	Yayasan Kathalisma 75	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : DJOKO SUDIBYO	b. Sek. : MUCHSIN	c. Bend:	Jl. Hasanudin 6 Blitar	SANANWETAN
102	YAYASAN	Yayasan Sunangiri	surat balasan	a. Ket. : SUBAKIR	b. Sek. : AGUS SALIM. MS	c. Bend	Jl. Tidar 16 – 17 Blitar	KEPANJENKIDUL
103	YAYASAN	Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Islam	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : Drs. FARIED AKHMAD I	b. Sek. : SUMARLAN	c. Bend:	Jl. Lekso 12 Blitar	SUKOREJO
104	YAYASAN	Yayasan Pendidikan Kebudayaan Nasional (YAPENAS)	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : M. HANAFI	b. Sek. : DIANA ERAWATI, SH.	c. Bend:	Jl. Tengger No. 36 Blitar	KEPANJENKIDUL
105	YAYASAN	Yayasan Pendidikan SMP Sore 2 Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : Hj. NAFISAT UN	b. Sek. : SOEHARMI	c. Bend:	Jl. Sultan Agung No. 36 C Blitar	SANANWETAN
106	YAYASAN	Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : Ny. ERNA ANANG T.	b. Sek. : Ny. JOENARSO	c. Bend:	Jl. Diponegoro No. 23 Blitar	SANANWETAN
107	YAYASAN	Yayasan Al-Istiqlal	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : ZAINUDI N KHOIRI	b. Sek. : MUHAMMAD MUSLIM	c. Bend:	Jl. Ir. Soekarno No. 88 Blitar	KEPANJENKIDUL
108	YAYASAN	Yayasan Pendidikan Luar Biasa	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : Drs. SUGIARTO	b. Sek. : Dra. CHASANAH	c. Bend:	Jl. TGP. No. 28 Blitar	KEPANJENKIDUL
109	YAYASAN	Yayasan Yohanes Gabriel Wijana Sejati	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : RM. A. PRATISTO. PR	b. Sek. : AGUS SURATNO	c. Bend:	Jl. Diponegoro No. 44 Blitar	SANANWETAN
110	YAYASAN	Yayasan Kalimasada (Kajian Penelitian Masyarakat Antar Daerah)	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : TUTUT GIRIANTO	b. Sek. : OYIK. RH	c. Bend:	Jl. Kaca Piring 71 Blitar	KEPANJENKIDUL
111	YAYASAN	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Blitar (YLKI)	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : M. HANAFI, SH	b. Sek. : DODIK . S. WAHYUDI	c. Bend:	Jl. Kenari II/9 Blitar	SANANWETAN
112	YAYASAN	Lembaga Pengembangan Sosial Dan Lingkungan Hidup / Yayasan Nasional Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : Ir. SUNARSO	b. Sek. : M. HANAFI	c. Bend:	Perumnas Pakunden Blok D / 10 Blitar	SUKOREJO
113	YAYASAN	Yayasan Mandiri	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : M.AGUS SLAMET, SE	b. Sek. : SUGENG YULIANTO	c. Bend:	Perumnas Pakunden Blok E1/24 Blitar	SUKOREJO
114	ORMAS	Pos Ekonomi Rakyat	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : SUPRIARNO	b. Sek. : WAHYOENI NGDYAH	c. Bend:	Jl. Ciliwung V/2	KEPANJENKIDUL
115	ORMAS	Forum Gerakan Pendidikan Nasional (FPGN) Blitar.	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : Drs. MAINI MARGONO	b. Sek. : Drs. TRI AMBULANTO	c. Bend:	Jl. Sultan Agung No. 66	SANANWETAN
116	YAYASAN	Yayasan Nasional	belum pembaharuan SKT	a. Ket : MUHAMMAD HANAFI	b. Sek. : CHRISNA PERMADI	c. Bend:	Jl. Tengger No. 36	KEPANJENKIDUL
117	YAYASAN	Yayasan Shidiqiyah	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : Drs. M.	b. Sek. : SAMSURI	c. Bend:	Jl. Turi No.3	SUKOREJO

				KUNTART O				
118	ORMAS	DPC. Pemuda Pancasila	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : MOESGIT O KHANCIL	b. Sek. : JHONI. BP.	c. Bend:	Jl. Jati IV/33 & Jl. Kerantil Gg. 6 No. 33	SUKOREJO
119	LSM	LSM Kipas	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : M. ANAS RIJAL, S.HI.	b. Sek. : CHOIRUL ROZIKIN	c. Bend:	Jl. Rayung Wulan 1A Blitar	SUKOREJO
120	LSM	LPM Wacana Nusa	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : Drs. WAHYU HIDAYAT	b. Sek. : TEDY ASPRINO, SE.	c. Bend:	Jl. S. Parman 52 Blitar	SANANWETAN
121	LSM	Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan Dan Pembangunan (LPKP)	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : SUTIAH	b. Sek. : TUNGGUL BANTOLO	c. Bend:	Jl. Beliton 24 Karangtengah Blitar	SANANWETAN
122	ORMAS	Organda Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : IR. HERI ROMADH ON	b. Sek. : MASDOEKI	c. Bend:	Aks Tubun I/46C Telp. 805374	SANANWETAN
123	YAYASAN	Yayasan Tunas Harapan Bangsa	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : RETNO WIDODO	b. Sek. : WIRATMO SUNIADJI	c. Bend:	Jl. S. Agung 5Blitar	SANANWETAN
124	YAYASAN	Yayasan Djaladri	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : ANDI YUWON O, S.Sos.	b. Sek. : YUSTINA HARINI, SE.	c. Bend:	JL. CIMANDIRI GG BUNTU LING. BADUT KEL TANGGUNG	SANANWETAN
125	YAYASAN	Yayasan Suaka Bangsa	belum pembaharuan SKT	a. Ket. : GATOT SARWON O	b. Sek. : INDIAR SHODIQ	c. Bend:	Jl. Masjid 63 RT 2/I Kauman Blitar	KEPANJENKIDUL
126	LSM	Lentera Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Muhama d Ghufron, S.Ag	b. Sek : W. Shomad Fathoni,S.A g	c. Ben.: Drs.Heri Sukotjo	Jl. Asahan Rt.01/Rw.01 Tanjungsari Blitar.	SUKOREJO
127	LSM	Persada II Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket.: D. EDY SANYOT O,B.Sc.	b. Sek : SUTRISNO	c. Ben.:MUJ IONO.	Jl. Dieng 26 a	KEPANJENKIDUL
128	ORMAS	Paguyuban Sang Galih Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket.: KH.AM.G ATUT HARDJIT O	b. Sek : YULI DWIANTO	c. Ben.:SWA RTI	Jl. Cisadane No.25 Kel.Bendo Blitar	KEPANJENKIDUL
129	ORMAS	Salimah Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket.: UMUL FADILAH, S.Si. Apt.	b. Sek : ERY MINTARSIH	c. Ben.: TUSTI SRI WAHYUNI	Jl. Barito Selatan No.24 Kel. Kauman	KEPANJENKIDUL
130	LSM	Serikat Buruh Merdeka (SBM) Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket.: MAHEND RA SETIA BUDI.	b. Sek : S. CHUSNUL CHOTIMAH	c. Ben.: SUSIATI	Jl. Patimura 128.c Blitar	SANANWETAN
131	ORMAS	Jurnalis Independent Blitar (JIB)	belum pembaharuan SKT	a. Ket : ARYO PURBOY O	b. Sek : M. IRFAN ANSHORI	c. Ben : KUSNUL HIDAYATI	Jl. Ir. Soekarno 24/B Blitar	KEPANJENKIDUL
132	LSM	Pusat Kajian Kebijakan Pemerintah (P2KP)	belum pembaharuan SKT	a. Ket : HENDIK BUDI YUANTO RO	b. Sek : FITRA RAHAYU ISMIATI	c. Ben : KURNIANTO	Jl. Sumatera No. 14 Blitar	SANANWETAN
133	LSM	LSM Soko Limo	belum pembaharuan SKT	a. Ket : MUCHSO N, SE	b. Sek : MUCHLIS WIBOWO, SE	c. Ben : PRIYAGUNG KUSUMOW	Jl. Ploso No. 12 Blitar	SANANWETAN

134	LSM	LSM Penegak Demokrasi	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Maksun Gozali, K	b. Sek : Amirul Mukminin	c. Ben : Nabat Kholifatul Janah	Jl. Masjid Al Firdaus Ds. Jinglylong Kaweron Talun Kab. Blitar	KABUPATEN
135	YAYASAN	Lembaga Yayasan Ponpes Mambaus Syafa'atil Qur'an Ngegong Gedog Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Nur Cholis	b. Sek : Moch. Sholikin	c. Ben : Abdul Kholik	Jl. Letda Markawi Ngegong Gedog Kota Blitar	SANANWETAN
136	YAYASAN	Yayasan Taman Pendidikan PA "Tarbiyatul Falah " Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : KA. Karim Muhaimin	b. Sek : Khoirul Huda	c. Ben : Dewi Halimah	Jl. Manggar No. 9 Blitar	SUKOREJO
137	YAYASAN	Yayasan Mambaul Hisam Pakunden – Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : H. Ali Mustofa	b. Sek : Afifatus Saadah	c. Ben :H. Sarianto	Jl. Asahan No. 52 Blitar	SUKOREJO
138	YAYASAN	Yayasan Taman Pendidikan Islam (YATPI) Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Drs. Sjamsuka	b. Sek : Moch. Djazuli	c. Ben : Ashar Panut, S.Pd	Jl. Diponegoro No. 8	SANANWETAN
139	YAYASAN	Yayasan Ponpes Bustanul Muta'allimin Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Muhtar Lubby S.Ag	b. Sek : Syamsul Gufron	c. Ben : Dewi Robithoh	Jl. Barito No. 2 Blitar	SANANWETAN
140	YAYASAN	Yayasan Al Istiqlal Hidayatullah Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Taufiq Sholihin	b. Sek : Muh. Muslim	c. Ben : Rido Wahyono, S.Ag	Jl. Srigading No. 52 Blitar	KEPANJENKIDUL
141	YAYASAN	Yayasan Ibadurrohman Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : M. Mansur Shodiq	b. Sek : Moh. Yarul Fathoni, S.Pd	c. Ben : Kusnatin	Jl. Kol Sugiono Gg. Masjid Ngegong ,Gedog, Blitar	SANANWETAN
142	YAYASAN	Yayasan Indonesia Baru	belum pembaharuan SKT	a. Ket. Purwanto, SPd	b. Sek. Yusnia Novayanti	c. Ben. Leili Rokhana	GMI Blok I No. 10 Blitar	KEPANJENKIDUL
143	YAYASAN	Ys Kemanusiaan Jatidiri Bangsa Cab. Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket. Mardani	b. Sek. Moch.Dardak	Ben.Mukhayani	Lk. Santren – Tanggung – Blitar	KEPANJENKIDUL
144	LSM	Forum Komunikasi Anjal (Forkom Anjal) Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket. Mohamad Santoso	b. Sek. Didik Oliyantoro	c. Ben.Slamet Kismanto	Jl. Pamungkur – Blitar	SUKOREJO
145	ORMAS	ORARI Lokal Blitar	belum pembaharuan SKT	a. A.W arjanto	b. Eddy Yunarko	c. Endang Werdiningsih	Jln.Diponegoro : 21 Blitar	SANANWETAN
146	LSM	Lembaga Swadaya Pemuda Mandiri	belum pembaharuan SKT	a. Ket. Nanang Pramadi	b. Sek.Me go Cahyo Winarbowo	c. Ben.Lely Arini	Jln.Borobudur Nomor : 22 / 28	SANANWETAN
147	LSM	LSM Rethink	belum pembaharuan SKT	a. Ket ChoirulU mam, S.Pd	b. Sek. Aris Susanto, SP	c. Ben. Desi Arma Susana	Jln.Sudanco Supriyadi No. 201 A	SANANWETAN
148	LSM	Pimpinan Umum Persatuan Korps Pembela Tanah Air (Korps Peta)	belum pembaharuan SKT	a. Ket. Arifan	b. Sek. Sri Amin	c. Musini	Jln. Sdc. Suparyono No: 27	SANANWETAN
149	ORMAS	Paguyuban Warga Eks Timor Timur (Pawartim) Daerah Kab/Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket. Siswanto	b. Sek. Fauzun Daroini	c. Bend. -	Jl. Sunan Kalijogo Link. Jajar – Kanigoro Blitar	KABUPATEN
150	YAYASAN	Yayasan Klenteng Poo An Kiong	belum pembaharuan SKT	a. Ket :Dg Thin Soek Liong	b. Sek : Dg. Dr Fenny Kowe	c. Ben : Dg. Tjio Nan San	Jl. Merdeka 194 Blitar	SUKOREJO

151	ORMAS	Paguyuban Pedagang Asongan Mandiri B2K	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Sugembo ng Wibowo	b. Sek : Dewi Purnomosari	c. Ben : Jumadi	Jln. Kalimas Rt 01/VI Pakunden	SUKOREJO
152	ORMAS	Ikatan Pecinta Sejarah Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Yon Muyono	b. Sek : Rahadi Priyo Sembodo	c. Ben : Hendra Tristiawan	Jl.Ir. Sukarno Gg.Suparjono 15	KEPANJENKIDUL
153	YAYASAN	Yayasan Patria Mulia (YPM) Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Fatkhur Rochman	b. Sek : Suryadi Hendratma ka	c. Ben : Somadi	Jln Turi Selatan	SUKOREJO
154	ORMAS	DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Bambang Sunarso	b. Sek : Sugianto	c. Ben : Subekti	Jl Ikan Gurami : 2 Perum Griya Kalimas Indah Pakunden Blitar	SUKOREJO
155	LSM	Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (RATU ADIL)	belum pembaharuan SKT	a. Moh ammad Triyanto	b. Pringgo Priyanggon o	c. Mahendr a Setia Budi	Jl Mendut Nomor : 49 Blitar	SANANWETAN
156	LSM	DPD LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI)	belum pembaharuan SKT	a. Budi ono, BSc	b. Ir. Bambang Gunawan	c. Sujito, SH	Jl Tengger No : 11 Blitar	KEPANJENKIDUL
157	LSM	LESKIA (Lembaga Study Kebijakan, Media dan Lingkungan) Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Herwidi Bastugito , SH	b. Sek. EdySaputra	c. Ben : Sri Haryati	Jl Wr Supratman 31 – C Blitar	SANANWETAN
158	ORMAS	Komunitas Pemerhati Warisan Budaya (BHS) Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Drh Mas Tranggon o	b. Sek : Bambang In Mardiono	c. Ben : Julianto Purnomo	Jl. Musi : 9 Blitar	KEPANJENKIDUL
159	ORMAS	FORWARA (Forum Sukwan Sekolah Negeri)	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Gunawan S.Pd	b. Sek : Hayu Priyanto, S.Pt	c. Ben : Kusbiantoro, A.Md	Jl. Moh. Hatta No. 12 Kota Blitar	KEPANJENKIDUL
160	LSM	DPD Pemuda Panca Marga (PPM)	belum pembaharuan SKT	a. Ket. Moch. Sidik	b. Sek Joko Nurbatin	c. Ben	Jalan Tanjung Nomor : 1 Blitar	SUKOREJO
161	ORMAS	Paguyuban "Guyub Rukun" Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket: Hadi Siswoyo	b. Sek: Susilo	c. Ben: Suyanto	Jl. Kerantil Gang 1 no. 05 Kota Blitar	SUKOREJO
162	ORMAS	Paguyuban Pemerhati Istana Gebang (PPIG) Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket: S. Setyawan	b. Sek: Eko Siswantoro	c. Ben: Edy Koesnadi	Jl. Dr. Soetomo No. 15 Kota Blitar	SANANWETAN
163	ORMAS	Paguyuban Forum Blitar Raya (FBR)	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Kadiono	b. Sek : Moch. Farouk	c. Ben : Hari Susilo	Jl. Kalimantan No. 35 Kota Blitar	SANANWETAN
164	YAYASAN	Yayasan H Sabih Goenadjaya dikoesoemah Cabang Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : H. Daiman Azis	b. Sek : Yusuf Jangkung	c. Ben : Ilma Ainur Riza	Jl. Ir. Soekarno 287Sentul Blitar	KEPANJENKIDUL
165	ORMAS	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten/Kota Blitar	belum pembaharuan SKT	a. Ket : Lestari	b. Sek : Nyoman K Yasa	c. Ben : Endang Sunarsih, M.Pd	KSU Artha Bhuana Ds Kendalrejo Talun Blitar	KABUPATEN
166	LSM	Lembaga Missi Reclasseering repubik Indonesia Badan Hukum & asyarakat (LMR RI-BPH.NMS) Bantuan Hukum Di Luar Negeri	belum pembaharuan SKT	a. Ket: Tugas Nanggolo Yudho	b. Sek: Rudi Puryono, SH	c. Ben: Aris Wiratno	Jl. Cemara No : 226 Blitar	SUKOREJO

		& Di Dalam Pengadilan						
167	YAYASAN	YAYASAN Perkumpulan Sahabat Perempuan Anak Kota Blitar	surat balasan				jl. Kawi 88	sukorejo
168	YAYASAN	Yayasan Putra Putri Tunas Bangsa	surat balasan				Jl. Ir. Soekarno No 341 A	KEPANJENKIDUL
169	YAYASAN	Yayasan Bina Bangsa Nusantara	surat balasan					SANANWETAN
170	ORMAS	PC. IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU) KOTA BLITAR	surat balasan				Jl. Cisadane RT 01 RW 03	KEPANJENKIDUL
171	YAYASAN	YAYASAN SURYA NUSWANTARA	surat balasan					SANANWETAN
172	YAYASAN	BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA (BAMAG) KOTA BLITAR	surat balasan					SUKOREJO
173	LSM	LSM KPK					PONGGOK	KABUPATEN
174	ORMAS	DPD PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA	surat balasan	Sri Winarni	Tutus Febri Ajimas Budi	Shultonah	Jl. Dr. Sutomo No. 56 Kota Blitar	SANANWETAN
175	ORMAS	DPC PERSAUDARAA N MITRA TANI NELAYAN INDONESIA	surat balasan	Triyono	Setyo Wibowo	Anjarwati	Jl. Kedondong 1/38 Kota Blitar	SUKOREJO
176	ORMAS	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIY AH	surat balasan	Sukma Uli Nuha	Fazuhtratul Hayati	Muchlis Yuli Arista	Jl. Ir. Sukarno No 13 Kota Blitar	KEPANJENKIDUL
177	ORMAS	Perkumpulan lembaga Kursus dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	surat balasan				Jl. Jawa No. 53 Kota Blitar	SANANWETAN
178	ORMAS	Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan	surat balasan				Jl. E no. 10 Tanjungsari Sukorejo Kota Blitar 085334544550	SUKOREJO
179	ORMAS	Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Blitar	surat balasan	Miskan Hadi Prasetyo, ST	Ismu Nursito, A.Ma	Katiman, S.Pd., M,Pd.	Perum Puri Kenari Asri Blok H-11 Kota Blitar	SANANWETAN
180	ORMAS	Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD)	surat balasan	Soegeng Joeniant o, ST	Tugas Nanggolo Yudho	H. Aris Wijaya	Jl. A.Yani RT/RW 01/VI	SANANWETAN
181	ORMAS	DPD KNPI (KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA)						
182	ORMAS	DPD AMPI (ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA)						
183	ORMAS	PATAS						

184	ORMAS	PEMUDA BATAK BERSATU PC BLITAR RAYA						
185	YAYASAN	BOLO CANGKRUK MUBROK						

DATA PARTAI POLITIK KOTA BLITAR

NO	NAMA PARNPOL	PENGURUS	ALAMAT SEKRETARIAT
1	 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	Ketua : MUCHSON, SE Sekretaris : DWI HARIONO TIMOTHY Bendahara : KURNIAWAN YUNUS	JL. KENARI NO. 48 BLITAR
2	 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Ketua : H. PURNAWAN Buchori Sekretaris : TOTOK SUGIARTO Bendahara : Drs. ABDUS SJAKUR	JL. SERAYU NO. 44 BLITAR
3	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Ketua : dr. LEO Sudilaksono Sekretaris : PUJIANTO dr. LAILY Bendahara : KURNIAWATI	PERUMAHAN KENARI JL. KABAINA BLOK A
4	 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Ketua : M. SAMANHUDI Anwar, SH GLEBOT CATUR Sekretaris : ARIANTO Bendahara : SUTANTO, SH	JL. DR. WAHIDIN NO 59 BLITAR
5	 PARTAI GOLONGAN KARYA	Ketua : Drs. Muh. HADI USODO Sekretaris : DJAROT SIDARTA Bendahara : HENI RATNAWATI	JL. KALIMANTAN NO. 81 BLITAR
6	 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	Ketua : Ir. ENDRO HARMONO, MBA Sekretaris : TAN NGI HING Bendahara : Drs. SLAMET	JL. TIMOR NO. 80 BLITAR
7	 PARTAI DEMOKRAT	Ketua : ITO TUBAGUS Aditya, SE Sekretaris : RIDHO HANDOKO MUH. BUSTANUL Bendahara : ARIFIN	JL. NIAS BLITAR
8	 PARTAI AMANAT NASIONAL	Ketua : DJOKO NURBATIN Sekretaris : SUJOKO Bendahara : NURMAN MUSLIH	JL. COKROAMINOTO Gg. MASJID
9	 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Ketua : AGUS ZUNAIDI, SE H. MUH. NUHAN EKO Sekretaris : W., SH	JL. KALI BRANTAS NO. 76

			Bendahara : ARIF RAHMAN	
10		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	Ketua : YOSSY YUKARDI NUSWANDITO Sekretaris : ANANTO Bendahara : SITI SUNDARI	JL. Dr. SUTOMO NO. 3 BLITAR
11		PARTAI BULAN BINTANG	Ketua : SISWANTO HW, Spd Sekretaris : SUSILO Bendahara : JUJONO	JL. S SUPRIYADI NO 201 A BLITAR
12		PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	Ketua : IRENE DWI A Sekretaris : Bendahara : RIEKA SILVIA	JL. KALI OPAK NO. 5 BLITAR
13		PARTAI BERKARYA	Ketua : HS WIJANTO Sekretaris : FAHMI WIRAJAYA Bendahara : RIZA RACHMADI	Jl. WR SUPRATMAN NO. 4 BLITAR
14		PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	Ketua : belum terdaftar di Sekretaris : bakesbangpol namun telah lolos Bendahara : pendaftaran peserta pilgub 2018	JL. KAWI NO. 25
15		PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Ketua : belum terdaftar di Sekretaris : bakesbangpol namun telah lolos Bendahara : pendaftaran peserta pilgub 2018	JL. CILIWUNG
16		PARTAI GARUDA	Ketua : belum terdaftar di Sekretaris : bakesbangpol namun telah lolos Bendahara : pendaftaran peserta pilgub 2018	

13. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 – 2020

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	45 %	47,6 %	60%	80,9%
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	76 %	73,98 %	78%	74,6%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. IKU pertama, jika dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan yaitu tetap dimana realisasi 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan 100 %.
2. IKU kedua, jika dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan yaitu tetap dimana realisasi 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan 100 %.
3. IKU ketiga, jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dibanding dengan target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2019

realisasi mencapai 47,6% dari target 45%, sedangkan untuk tahun 2020 realisasi 80,9% dengan target 60%.

- IKU keempat, jika dibandingkan tahun sebelumnya capaian realisasinya semua dibawah target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2019 dari target 76% hanya terealisasi sebesar 73,98% sedangkan untuk tahun 2020 dari target 78 % hanya tercapai 74,6%.

14. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Kinerja Tahun 2020		Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	80 %	60 %	80,9 %	101,13 %
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	80 %	78 %	74,6 %	93,25, %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk IKU pertama dan IKU kedua yaitu persentase kejadian SARA yang tertangani dan persentase konflik sosial yang tertangani, capaian realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target akhir renstra 2016-2021 sama yaitu sebesar 100% dengan tingkat kemajuan juga 100%.

Untuk IKU ketiga yaitu Persentase Kelurahan Tangguh Bencana capaian kinerja untuk tahun 2020 sebesar 80,9 % sudah berada di atas target akhir renstra 2016-2021 yaitu 80%, hal ini disebabkan dari 21 kelurahan yang ada sudah terbentuk 17 kelurahan tangguh bencana dan kekurangannya 4 kelurahan akan dibentuk pada tahun 2021 baik dengan anggran murni maupun anggaran P-APBD tahun 2021.

Sedangkan untuk IKU terakhir atau keempat yaitu persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang terdaftar, realisasinya tercapai 74,6 % masih dibawah target akhir renstra 2016-2021 yaitu 80%. Hal ini dikarenakan dari 201 organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik masih 150 yang terdaftar.

B. Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan dana untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Tabel di bawah ini menyajikan data belanja tidak langsung dan belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2020.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Langsung

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	3.289.057.741,00	2.734.786.604,00	83,15
2.	Belanja Langsung	6.190.033.875,00	5.370.678.038,00	86,76
	Jumlah	9.479.091.616,00	8.105.464.642,00	85,51

Rincian untuk realisasi anggaran belanja langsung seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Belanja Langsung untuk Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2020

NO	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Program Pelayanan Perkantoran	823.925.350,00	763.112.468,00	92,62
1	Pengelolaan Administrai Perkantoran	136.614.800,00	115.695.400,00	84,69
2	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	197.649.100,00	179.042.986,00	90,59
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	468.461.450,00	447.174.082,00	95,46
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
6	Penyusunan Laporan Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
B	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	61.491.150,00	59.305.000,00	96,44
1	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	30.836.400,00	28.888.000,00	93,68
2	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	30.654.750,00	30.417.000,00	99,22
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

1	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
D	Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Korban Bencana	1.007.294.300,00	763.603.000,00	75,81
1	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana	447.979.000,00	342.625.000,00	76,48
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Logistik, dan Fasilitas Rehab, Rekon Kebencanaan	559.315.300,00	420.978.000,00	75,27
E	Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	830.195.075,00	708.237.515,00	85,31
1	Penguatan Kewaspadaan Daerah	174.843.900,00	152.772.800,00	87,38
2	Pencegahan dan Penanganan Konflik	655.351.175,00	555.464.715,00	84,76
F	Program Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa	458.309.000,00	403.606.000,00	88,06
1	Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia	313.479.700,00	286.589.500,00	91,42
2	Peningkatan Pengembangan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	144.829.300,00	117.016.500,00	80,80
G	Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi	2.998.819.000,00	2.662.814.055,00	88,80
1	Peningkatan Kesadaran Politik dan Kapasitas Politik	468.463.900,00	426.109.300,00	90,96

2	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	172.842.000,00	165.397.400,00	95,69
3	Penyelenggaraan Pendukung Pemilu	2.357.513.100,00	2.071.307.355,00	87,86

1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.6
Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	458.309.000,00	4,83
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	830.195.075,00	8,76
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	1.007.294.300,00	10,63
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	2.998.819.000,00	31,64
JUMLAH		5.294.617.375,00	55,86

Total alokasi anggaran untuk keempat sasaran pembangunan adalah Rp 5.294.617.375,00 atau 55,86% dari total jumlah anggaran tahun 2020 yaitu Rp 9.479.091.616,00, dengan rincian untuk sasaran pembangunan pertama : Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama mendapat anggaran Rp 458.309.000,00 atau 4,83%. Sasaran kedua: Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram mempunyai anggaran sebesar Rp 830.195.075,00 atau 8,76%. Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, anggaran yang

diperoleh Rp 1.007.294.300,00 atau 10,63%. Sasaran terakhir atau keempat adalah Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik dengan anggaran Rp 2.998.819.000,00 atau 31,64%.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Tar- get (%)	Real- isasi (%)	Capai- an (%)	Alokasi	Realisasi	Capai- an (%)
Sasaran 1							
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100	100	100	458.309.000,00	403.606.000,00	88,06
Program 1.1							
Program Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penduduk usia 14-59 tahun yang mengikuti wawasan kebangsaan	90	83,57	92,85	458.309.000,00	403.606.000,00	88,06
Sasaran 2							
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100	100	100	830.195.075,00	708.237.515,00	85,31
Program 2.1							
Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase potensi konflik yang terdeteksi ditangani	100	100	100	174.843.900,00	152.772.800,00	87,38
	Persentase penanganan penyakit masyarakat	100	104,31	104,31	655.351.175,00	555.464.715,00	84,75
Sasaran 3							
Meningkatnya ketangguhan masyarakat	Persentase Kelurahan	60	80,9	134,8	1.007.294.300,00	763.603.000,00	75,81

dalam menghadapi bencana	Tangguh Bencana						
Program 3.1							
Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase tertanganinya kejadian bencana	100	83,66	83,66	1.007.294.300,00	763.603.000,00	75,81
Sasaran 4							
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	78	74,6	95,6	2.998.819.000,00	2.662.814.055,00	88,80
Program 4.1							
Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi	Persentase penduduk pemilih yang menggunakan hak pilihnya	81	81,89	101,09	468.463.900,00	426.109.300 ,00	90,96
	Persentase ormas/orpol yang dibina sesuai aturan	78	78	100	172.842.000,00	165.397.400,00	95,69

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100	88,06	1,14
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100	85,31	1,17
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	134,8	75,81	1,78
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	95,6	88,80	1,08

Keterangan:

≥ 1 = efisien

< 1 = tidak efisien

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar telah mendapatkan prestasi/ penghargaan dari hasil Evaluasi SAKIP dengan memperoleh kategori A (memuaskan).



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar pada Tahun 2020 mampu merealisasikan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian empat indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar Tahun 2020 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran:

1. Sasaran I

Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama

Indikator sasaran: Persentase kejadian SARA yang tertangani

Target : 100 %

Realisasi : 100 %

Capaian kinerja : 100 %

Pada sasaran I ini terindikasi potensi konflik SARA di Kota Blitar dengan adanya aktifitas yang diduga aktivitas keagamaan menyimpang. Agar potensi ini tidak berkembang menjadi konflik SARA maka dilakukan mediasi dan koordinasi rembug antar pihak yang terkait dan FKUB.

2. Sasaran II

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram

Indikator sasaran: Persentase Konflik Sosial yang Tertangani

Target : 100 %

Realisasi : 100 %

Capaian kinerja : 100 %

Permasalahan yang ada pada sasaran II ini adalah maraknya konflik terkait masalah sosial, ekonomi, infrastruktur di Kota Blitar. Perbedaan persepsi antara pihak ketiga, masyarakat, dan instansi terkait. Kendala yang dihadapi masih kurangnya pemahaman terkait regulasi yang mengatur dan adanya traumatik masyarakat terhadap keberadaan status tertentu karena

dianggap mengganggu/mengancam kehidupan masyarakat. Kebijakan yang diambil untuk permasalahan tersebut diantaranya sosialisasi tentang regulasi yang mengatur, penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku, mediasi dan koordinasi rembug antar pihak yang terkait.

3. Sasaran III

Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Indikator sasaran: Persentase Kelurahan Tangguh Bencana

Target : 60 %
Realisasi : 80,9 %
Capaian kinerja : 134,8 %

Dengan sudah terbentuknya 17 kelurahan tangguh tentunya perlu pemdampingan lebih intensif dengan melibatkan peran relawan, organisasi kebencanaan, PMI, Tagana, MMDMC, dan Pramuka.

4. Sasaran IV

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik

Indikator sasaran: Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar

Target : 78 %
Realisasi : 74,6 %
Capaian kinerja : 95,6 %

Masih rendahnya persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan belum terdeteksinya secara maksimal Ormas/LSM yang aktif dan tidak aktif menjadi faktor pendorong belum tercapainya target yang sudah ditetapkan sebesar 78%, hal ini terkendala oleh kurangnya kesadaran pengurus Ormas/LSM untuk mentaati peraturan yang berlaku. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dengan sosialisasi aplikasi database Ormas/LSM dan membentuk Tim Pengawasan Ormas dan memberikan pembinaan kepada Ormas/LSM secara berkala.

Hasil dari analisis pengukuran kinerja ini dapat digunakan sebagai pijakan penentuan kebijakan berikutnya untuk tetap konsisten dalam jalur pewujudan

Good Governance

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama
Langkah perbaikan yang dilakukan:

Meningkatkan Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)

2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram

Langkah perbaikan yang dilakukan:

Melakukan mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik social/masyarakat yang terjadi/muncul dan bekerjasama dengan instansi terkait

3. Mengoptimalkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Langkah perbaikan yang dilakukan:

Pendampingan lebih intensif kepada Kelurahan tangguh bencana yang sudah terbentuk dengan melibatkan peran relawan, organisasi kebencanaan, PMI, Tagana, MMDMC, dan Pramuka.

4. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik
Langkah perbaikan yang dilakukan:

Sosialisasi aplikasi data base organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar Tahun 2020, semoga dapat memberikan informasi yang jelas akan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar akan

mendapat masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang-NYA sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dengan tulus ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Dan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar

